



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



Optimistis Cirebon Bahagia



ilustrasi: boykedatu

Sudahkah resolusi 2021 tersusun dengan baik? Jika sudah, langkah selanjutnya harus optimis. Keyakinan menjadi kunci pembuka kesuksesan. Berniat sebelum melangkah tidak kalah penting. Sebab, niat menjadi penentu nilai pencapaian tujuan.

2021 ada asa yang harus diwujudkan, Cirebon bahagia. Setiap persoalan yang telah inventarisasi dipilah dalam penentuan skala. Prioritas tidaknya persoalan yang diselesaikan harus jelas. Dapat dilakukan dengan kajian strategis dan perencanaan yang matang.

Optimistis semua *stakeholder* harus seirama. Legislatif, eksekutif, hingga komponen masyarakat memiliki kesamaan misi untuk Kabupaten Cirebon lebih baik. Berkarya sesuai tugas dan fungsi secara optimal.

Mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengedepankan kebersamaan.

Lantas apa indikator Cirebon Bahagia? Kebahagiaan yang dimaksud tertuju pada masyarakat Cirebon. Dalam rilis *World Happiness Report 2018*, setidaknya ada enam indikator kebahagiaan, yakni jumlah pendapatan, harapan hidup sehat, dukungan sosial, kebebasan dan kemerdekaan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan memiliki kedermawanan.

Keenam indikator itulah yang harus dicapai. Maka perlu terobosan kebijakan yang lebih jelas dan nyata. *Output* program harus terukur dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Saatnya kerja nyata dan menghasilkan, bukan lagi kerja asal-asalan.

Salam Cirebon Katon!

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhijana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Riset)

Ardiles Afla Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi :

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Resolusi 2021



14 | KILAS

Evaluasi Kinerja Satpol PP



18 | PUBLIKA

Perlu Perbaikan Jalan Suropati



20 | LENSA

Tekad Keras Kuli Panggul



22 | DINAMIKA KOMISI

Komisi I Ingin e-KTP 3 Hari Jadi

24 | Komisi II: Perlu Rencana Tindak Lanjut Pengem-
bangan Lebah Madu

26 | Komisi III Minta Perusahaan Bertanggung Jawab

28 | Komisi IV : Perlu Gebrakan Besar
Selesaikan Problem Sosial



30 | PROFIL

Fraksi PKB
Peduli Umat Melayani Rakyat



33 | INSPIRASI

Rumah Baca Asap: Menghidupkan Literasi
dan Permainan Tradisional Anak

36 | POTENSI

Sinarancang View

Resolusi 2021

Pada masa sidang 2021, DPRD melalui alat kelengkapan dewan akan trengginas dalam mendorong Pemda selesaikan programnya. Bagaimana caranya?



Ilustrasi: boj/kedatu

Tak terasa sudah masuk 2021. Semangat baru untuk selesaikan PR sudah menanti. Pun berbagai masalah nyata yang dihadapi masyarakat belum semuanya tuntas. Terlebih, pandemi covid 19 yang belum bisa diperkirakan kapan berakhir. DPRD Kabupaten Cirebon pun bersiap melanjutkan lonjakan untuk tampil lebih *extraordinary* dalam legislasi, penga-

wasan maupun *budgeting*.

Pandemi covid 19 atau corona telah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Cirebon. Virus ini menjadi penghambat bagi stabilitas kehidupan. Baik secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Akhirnya *refocusing* pun tak bisa dihindarkan.

Padahal, setumpuk keluhan dan masalah sosial pun, sudah

menyergap sejak tahun lalu. Di antaranya: sampah, kesejahteraan sosial, kesehatan, UMKM, Bumdes, infrastruktur hingga capaian peningkatan PAD.

Dalam masa sidang tahun ini, DPRD Kabupaten Cirebon akan menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas. Pertama, payung hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Dari 28 rancangan

peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan dari eksekutif dan legislatif, baru 10 Perda yang diketuk tahun lalu. Artinya masih ada 18 Raperda yang sudah menanti. 4 Perda inisiatif DPRD dan 14 milik bupati.

nan kesejahteraan sosial, sampah dan infrastruktur untuk melanjutkan problem populis yang belum tuntas. Mereka berharap, serapan anggaran pada tahun ganjil akan lebih maksimal tanpa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

dinilai masih lama pembuatan e-KTP. Serta data yang seringkali ditemukan rangkap. Mereka juga akan memperhatikan kinerja Inspektorat dalam mengonsep sekaligus mengimplementasikan program atau anggaran Pemda dan desa, sesuai fungsi audit internal manajemen pemerintahan.

Selanjutnya, Komisi II sebagai *leading sector* perekonomian pun, juga akan fokus pada peningkatan PAD pada ruang strategis. Melalui sektor UMKM, perindustrian dan lain sebagainya. Selain itu, dalam tupoksinya sebagai legislasi, ada Perda Holding Bumdes, UMKM dan kawasan industri.

Sedangkan pada Komisi III, pekerjaan rumah sudah menanti kembali. Setumpuk keluhan masyarakat menyergap. Infrastruktur jalan dan sampah masih menjadi problem tak kunjung usai. Komisi III berscepat 2 masalah itu bisa selesai tahun ini.

Mereka pun akan mendorong Dinas PUPR, sebelum datangnya musim hujan. Sementara untuk mengatasi persoalan sampah, akan mengupayakan penambahan truk pengangkut sampah yang sebelumnya hanya 1 truk di setiap kecamatan.

Terakhir, DPRD juga punya tugas besar melalui Komisi IV dalam pelayanan publik. Berbagai persoalan *grassroot* ada pada bidang ini. Masalah sosial, kesehatan, pendidikan merupakan masalah populis yang mesti diselesaikan. Mereka pun berencana menjaga capaian BPJS, pendidikan, dan memfokuskan 1 program di setiap dinas.

Semoga rencana dan harapan pada resolusi ini akan semakin memberi perubahan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Tentunya selain membuat *katon*, agar asa bahagia, bisa terwujud.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cirebon yang menggodok Raperda berencana akan mengesahkan 3 Perda pada triwulan ini. Sementara 14 Raperda inisiatif eksekutif yang sempat pending juga akan serius digodok kembali,

Selain itu, Badan Anggaran (Banggar) juga menyiapkan anggaran dalam fokus untuk penanga-

Sementara dalam proses pengawasan. DPRD Kabupaten Cirebon melalui Komisi juga akan tampil trengginas. Dimulai melalui Komisi I yang berencana menuntaskan problem dinas strategis. Terlebih, pada tahun ini, juga ada hajat besar Pilwu.

Kemudian, pada semester awal tahun ini, Komisi I pun memiliki rencana menguatkan pelayanan Disdukcapil yang

Bapemperda Target 100% Sahkan Perda

Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon siap mengejar pembahasan raperda pada tahun ini. Baik inisiatif DPRD maupun bupati.



foto: freepik

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cirebon Mukhlisin Nalahuddin, mengatakan dari 28 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk Propemperda, hanya 10 Perda yang sudah disahkan. Itu pun hanya Perda ini-

siatif DPRD. Sedangkan, inisiatif bupati belum dapat dihantarkan. Menurutnya, hal itu disebabkan pandemi yang berimplikasi besar bagi kerja eksekutif. Terutama akibat *refocusing* anggaran. Eksekutif, mengutamakan aspek pada kemanusiaan untuk pengadaan peralatan medis, yang

anggarannya tidak sedikit. Sehingga berpengaruh pada target pengesahan Raperda. Raperda yang ditarik kembali diantaranya, Raperda Kawasan Tanpa Rokok (TKR) akibat anggarannya nihil. "Tahun ini, eksekutif berencana menghantarkan kembali.

Sehingga tersisa 18 raperda yang telah masuk Propemperda," jelasnya.

Mukhlisin mengaku, proses pembentukan Perda selangkah lebih maju, karena telah berkomunikasi dengan baik. Ini terbukti melalui tim penyusun dari unsur bupati maupun DPRD yang saling koordinatif.

Ia pun mengatakan, saat ini baik eksekutif dan legislatif, telah mereview dan mengkaji ulang mana saja Perda yang bisa sinkron dengan peraturan di atasnya. Seperti diketahui, sejak UU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan oleh DPR RI, berdampak pada seluruh aturan provinsi maupun kabupaten yang mengharuskan terpayungi oleh aturan lebih tinggi.

Permendagri No 120 tahun 2018 mengatur tahapan Raperda sebelum disahkan melalui paripurna. Pertama Fasilitasi, yakni pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.

Kedua proses verifikasi, yakni, tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Nomer Registrasi (Noreg).

Terakhir Klarifikasi, yakni, pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Sebagaimana diketahui dalam penyusunan Perda, kata Mukhlisin, Perda Inisiatif DPRD yang telah diusulkan di bahas oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Setelah selesai akan disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas



foto: quora/ik

Mukhlisin Nalahudin, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon

bersama-sama.

Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan.

Selanjutnya Bupati mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut dan untuk pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penomoran Perda, penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut.

Setelah itu, Perda dikirimkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, dan apabila sudah disetujui baru ditetapkan oleh Bupati lalu dikirimkan kembali ke Provinsi. Tim Penyusun Produk Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

setelah selesai akan disampaikan kembali, kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama.

"Kami di Bapemperda sebagai leading, harus lebih banyak mempertimbangkan agar tidak ada bentrokan hukum," jelasnya.

Mukhlisin berharap, proses pengesahan 18 Raperda bisa diselesaikan tahun ini. Ia mendukung penuh sinergitas dalam proses pembentukan Perda antara eksekutif dengan legislatif. Menurutnya, DPRD Kabupaten Cirebon sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bupati Cirebon sesuai visi misi bupati.

Ia berencana akan mengesahkan 3 Perda para triwulan pertama 2021 ini. Diantaranya: Perda MDTA, Holding Bumdes dan PJJ.

"Ibaratnya, kita akan kejar. Kalau Perda inisiatif DPRD tinggal 4 Insyaallah selesai lah. Tinggal eksekutif saja," katanya. •suf

Badan Anggaran Optimalkan! Serapan Anggaran

Dalam proses penyusunan anggaran 2021, Banggar DPRD Kabupaten Cirebon telah mengikuti sesuai tahapan undang-undang yang berlaku. Program yang diketok palu pun, merupakan kelanjutan 2020 yang belum tuntas. Banggar berharap serapannya bisa lebih optimal. Mampukah?



Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa tahun anggaran. Terhitung

sejak 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya. Dalam prosesnya, APBD dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

DPRD Kabupaten Cirebon

memiliki kewenangan, untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang diajukan oleh eksekutif, menjadi APBD.

Hal itu menjadi tupoksi Badan Anggaran (Banggar), sebagai alat kelengkapan dewan yang berfungsi menyusun rancangan APBD. Dimulai dari tahap perencanaan hingga sampai disahkannya APBD.

Seperti diketahui, APBD Kabupaten Cirebon untuk anggaran 2021 berada di angka Rp 3,47 triliun. Proses penyusunan dan pengajuan anggaran melalui beberapa tahap. Dimulai sejak Musrenbang desa maupun kecamatan.

“Proses ini acuannya tetap sama, berawal dari usulan masyarakat. Saya berharap usulan pembangunan infrastruktur maupun SDM segera dilakukan melalui Musrenbang bulan depan. Semoga anggaran yang sudah sepakati tahun ini, berbeda dengan tahun lalu, tidak *refocusing* kembali,” kata Aan Setiawan SSi, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Cirebon.

Ia pun, mendorong desa-desa agar terus berinovasi dalam menentukan arah pembangunan. Terlebih, akibat pandemi covid 19 yang telah meluluhlantakan sendi kehidupan maupun ekonomi. Ia berharap segala persoalan bisa segera teratasi.

Aan yang juga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mengatakan, dampak covid-19 ini begitu kompleks. Sehingga berbagai program bantuan pemerintah pun sudah disalurkan.

“Kami akan terus mengoptimalkan dalam membantu masyarakat yang terdampak covid-19,” katanya.

Dia pun sedang berupaya, agar bantuan untuk masyarakat bisa lebih ditingkatkan. Mengingat bantuan yang diperoleh juga masih belum merata. Hal itu ia lakukan dengan memfokuskan serapan anggaran terhadap per-



Aan Setiawan, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Cirebon

soalan kesehatan dan ekonomi.

“Masalah kesehatan, anggarannya masih seperti tahun lalu. Tapi, kami akan terus melakukan agar bisa ditingkatkan lagi. Sekalipun untuk BPJS sudah dianggarkan oleh pemerintah. Kami mengajukan anggaran kembali untuk kesehatan, sekitar Rp 100 miliar. Kami juga akan terus coba mengawal, agar perekonomian meningkat lagi. Kami akan berusaha,” jelasnya.

Selain itu, politisi Fraksi PDIP itu juga berencana menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Menurut Aan, sesuai laporan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, banyak pabrik-pabrik yang menghentikan karyawannya akibat pandemi. Langkah ini akan menjadi PR besar baginya untuk memberikan solusi bagi korban PHK.

“Kita akan melobi perusahaan-perusahaan, yang kemarin sempat mem-PHK-kan karyawannya agar bisa bekerja kembali,” ujar Aan.

Selain itu, ia juga mencoba lebih transparan perihal lapangan kerja. Sebab ia berharap dengan terbukanya kesempatan kerja, akan dapat meminimalisir pengeluaran anggaran Kabupaten Cirebon. Sehingga hal itu bisa fokus dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.

“Selain memberikan stimulus lebih dari tahun kemarin. Kebetulan, pemerintah pusat membuka tenaga kontrak melalui PKK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) dan PNS. Kuotanya sudah dikirim, hampir sekitar 5 ribu untuk dijadikan P3K. Karena P3K digaji oleh pemerintah pusat, ini akan sedikit mengurangi anggaran,” katanya.

Menurut Aan, pada saat rapat Banggar, semua sudah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan DPRD Kabupaten Cirebon. “Anggaran juga sudah diketok palu. Semoga serapan anggaran tahun ini bisa lebih optimal tanpa SiLPa,” tandasnya. •suf

Komisi I Tuntaskan Problem Dinas Strategis

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon berencana memperbaiki kinerja dinas strategis dalam resolusinya. Dari DPMD hingga Diskominfo. Bagaimana implementasinya?



Abdul Rohman, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Sebagaimana fungsi DPRD sebagai pengontrol eksekutif. Komisi I mempunyai peran strategis mengawal pemerintahan. Terlebih pada dinas yang menjadi mitra kerjanya.

"Kami memiliki mitra kerja yang strategis. Tahun ini, kita akan menggencarkan pengawasan dinas yang memiliki pelayanan prima," jelas Abdul Rohman, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Pertama, kata dia, akan mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dalam tata kelola sistem keuangan desa (Siskeudes) yang produktif. Rohman menilai, DPMD merupakan motor dan *action* manajemen pengelolaan tupoksi anggaran dana desa maupun ekonomi desa. Sehingga, hal ini harus didukung Siskeudes yang optimal.

Selain itu, pada tahun ganjil ini, Kabupaten Cirebon akan memiliki hajat besar pemilihan kuwu (Pilwu). Kata Rohman, DPMD memiliki kewenangan terhadap kebijakan, manajemen,

sistem dan *report*.

"Itu harus menjadi konsen kami untuk menguatkan di DPMD," ujarnya.

Kedua, politisi Fraksi PDIP itu juga berencana, akan menguatkan kembali Disdukcapil dalam manajemen data yang valid, juga pada pengelolaan sinergitas data. Sejauh ini, ia melihat kendala di lapangan masih banyak yang belum terselesaikan.

"Kita ingin punya peran penguatan data pelayanan yang efektif. Bikin KTP masih lama, data NIK ganda, itu masih menjadi problem besar, harus *clear* pada pertengahan tahun ini," jelasnya.

Kemudian, menurut Rohman, isu strategis lainnya yang akan didorong oleh Komisi I mengenai, kerja Inspektorat dalam tupoksinya sebagai audit internal manajemen pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Inspektorat memiliki kendali audit dalam perencanaan program maupun berkenaan anggaran Pemda dan desa.

Ia berharap, kerja Inspektorat agar profesional dalam mereview dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Rohman bilang, dalam pos audit, seharusnya Inspektorat tidak hanya pada proses pelaksanaan, namun juga harus ikut serta dalam proses perencanaan. Yang akhirnya mampu memberikan *advis* yang tepat.

"Tidak hanya menjadi *watchdog*. Melihat, mengendus ketika ada temuan. Tetapi sebelum itu juga harus melakukan tindakan preventif," katanya.

Ia juga bilang, peran serta instansi baik Pemda dan desa dalam melibatkan Inspektorat pada perencanaan program. Sehingga, bermuara terciptanya *quality* terhadap belanja anggaran yang ada di Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya, dalam resolusi 2021 ini, Komisi I juga mendorong profesionalitas Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM), dalam mengatur jenjang karir pegawai.

"Kita harus profesional. Salahsatunya harus berkomitmen pada konsep *married system* jenjang karir yang manusiawi. Pegawai mesti diberikan jabatan sesuai dengan kapasitas mereka," jelas Rohman.

Terakhir, resolusi Diskominfo dalam pengelolaan *smartcity* yang tidak hanya pada proses kendali sosial masyarakat. Program *smartcity*, kata Rohman, harus memiliki rencana tindak lanjut yang telah dilakukan eksekutif.

Ia juga berharap, peran Diskominfo dalam menjadi *leading sector* sumber data pembangunan maupun data penduduk.

"Diskominfo harus menjadi sumber data yang tidak hanya mengacu pada Disdukcapil maupun dinas lainnya, tapi Diskominfo harus punya data sendiri," katanya.

Komisi II Peningkatan PAD Berbasis UMKM

Target utama Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, berencana mendorong peningkatan PAD Kabupaten Cirebon melalui sektor UMKM. Seperti apa?



Mad Saleh, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon

Mengawali tahun baru, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon akan bekerja lebih ekstra. Karena banyak harapan yang akan dilakukan di 2021. Ini menjadi langkah baru, terutama demi kebaikan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Dengan mengantongi wacana yang akan direalisasikan, fokus Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, terus mengoptimalkan kinerjanya.

"Harapan saya, 2021 akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sektor di Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon. Kita perlu meningkatkan lebih, agar tercapainya masyarakat Kabupaten Cirebon yang makmur dan sejahtera," kata Mad Saleh, Ketua Komisi II

DPRD Kabupaten Cirebon.

Mad Saleh mengatakan, agenda peningkatan PAD menjadi target utama di Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon. Sebab pada kenyataannya PAD Kabupaten Cirebon pada tahun lalu hanya Rp 600 miliar.

"Ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Dengan meningkatnya PAD, maka APBD Kabupaten Cirebon juga akan meningkat," jelasnya.

Tekad Komisi II pun tidak main-main. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Ridwan telah mencanangkan beberapa program baru. Pertama, bekerjasama dengan banyak elemen, guna mewujudkan program yang berbasis kebutuhan masyarakat.

"Proses ini tentu menjadi awal

perubahan komisi II DPRD Kabupaten Cirebon. Kita ingin membangun potensi-potensi yang selama ini terpendam. Terutama sektor UMKM," jelas Ridwan.

Ridwan sangat berharap, terhadap program pengembangan pola UMKM bisa bersifat permanen, tetapi dengan modal yang terjangkau. Ia menilai, sektor UMKM akan sangat membantu masyarakat dalam menggali potensi-potensi lokal yang ada.

"Insya Allah kita akan dorong pelatihan-pelatihan UMKM, seperti pelatihan lebah madu yang sampai saat ini masih berjalan di Winduhaji, Waled dan Cupang. Insyallah akan dilaksanakan kembali Maret ini," katanya.

Seperti diketahui, Dinas Pertanian sudah melakukan pelatihan pengembangan lebah madu sejak 2 tahun lalu. Namun sejauh ini, Ridwan bilang, belum ada transparansi maupun koordinasi dengan DPRD.

"Dinas Pertanian harus transparan kepada DPRD Kabupaten Cirebon. Kami berharap, ke depan harus membangun relasi, tanpa ada rahasia-rahasia," tandas Ridwan.

Senada dengan itu, Hanafi berharap, kerjasama antara dinas dengan DPRD Kabupaten Cirebon bisa lebih solid. "Jangan sampai seolah kerja sendiri. Sebagaimana *tagline* bupati. Tujuannya agar masyarakat Kabupaten Cirebon lebih 'katon' lagi," katanya. •lan

Komisi III Extraordinary Tuntaskan Jalan hingga Sampah

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berencana melanjutkan pekerjaan rumah yang belum selesai pada 2021 ini. Jalan dan sampah. Bagaimana caranya?



Hermanto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon

Awal 2021 seharusnya menjadi hal baru dalam tindakan. Namun tu tidak berlaku bagi Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon. Pasalnya, pekerjaan rumah tahun lalu sudah menghadang di depan mata. Jalan rusak, sampah, hingga saat ini belum semuanya teratasi. Terlebih, pasca kebijakan *refocusing* anggaran untuk pandemi.

"Jalan rusak masih menjadi sorotan utama, karena menyangkut lalu lalang masyarakat," ujar Hermanto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, saat ditemui di ruangannya.

Ketika musim penghujan datang, jalan berlubang sudah menjadi hal umum. Hermanto memperkirakan, musim hujan akan berakhir hingga April 2021. Hal ini akan menyebabkan kerusakan jalan yang semakin parah.

Selain itu juga, ada perbedaan mencolok jalan sekarang dengan

yang dulu, Hermanto mengutip dari ketua DPRD. "Ada kritik dari ketua DPRD pada saat evaluasi tentang perubahan RPJMD, dengan melihat fakta sekarang, jalan tidak memiliki saluran air. Ini berbeda dengan dulu. Terutama di jalan desa, hampir 80 persen tidak ada, walaupun ada hanya 20 persen," paparnya.

Ketika musim hujan berlangsung, jalan berlubang telah banyak ditemui. Hermanto mengupayakan agar kejadian tahunan tidak terulang. Ia pun, sejatinya telah memberikan masukan kepada Dinas PUPR agar pembangunan jalan bisa tahan lama di musim hujan.

"Harusnya penambalan jalan yang berlubang dilakukan sebelum musim hujan, kalau ditambal pas musim hujan itu sama saja bohong. Karena aspal itu musuhnya air, jadi sebegus apapun aspalnya, jika bertemu dengan

air, ya pasti rusak," katanya.

Selain persoalan jalan, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon juga masih memiliki problem mengenai sampah. Seperti diketahui, persoalan sampah di Kabupaten Cirebon tergolong darurat. Kedua agenda tersebut, kata Hermanto, masih *urgent* dan menjadi target utama di tahun ganjil ini. Ia bilang, pemerintah harus lebih optimal agar bisa secepatnya ditangani.

Salah satu kendalanya, minusnya armada pengangkut sampah. Menurut Hermanto, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, saat ini baru memiliki 40 armada untuk 40 kecamatan. "Kalau 1 kecamatan 1 armada, kira-kira bisa membersihkan tidak? Karena dari satu kecamatan mencakup 10 sampai 12 desa. Apakah satu truk bisa mengangkut untuk 12 desa? Kita perlu penambahan," ujarnya.

Terakhir, selain kurangnya armada, Hermanto berpendapat anggaran yang diajukan untuk penanganan sampah oleh pemerintah, masih jauh dari harapan. "DLH membutuhkan anggaran sekitar Rp 33 milyar, untuk membeli truk dan operasional lainnya. Tapi mereka hanya mengusulkan Rp 6 milyar. Ini kan jauh, bagaimana bisa selesai? Bagaimana masyarakat bisa nyaman bebas dari sampah?" tuturnya.

Ia pun, dengan seluruh anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, masih akan tetap melanjutkan problem yang belum selesai pada 2021 ini, dengan kerja pengawasan secara luarbiasa.

"Resolusinya 2 saja cukup, belum ada yang baru. Kalau 2 problem besar itu bisa diselesaikan maka sangat terasa sekali bagi masyarakat," katanya. •lan

Komisi IV Benahi Satu Fokus Program Dinas

Setiap dinas memiliki 1 fokus program yang telah dikerucutkan. Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pun berencana kerja ekstra dalam pengawasan.



Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon

Ruangan itu tidak hanya dipenuhi oleh anggota dewan. Beberapa orang sedang mengadu kartu BPJS-nya yang nonaktif, karena kesalahan NIK-nya.

Hal ini menjadi garapan fokus Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon dalam 2021 ini. Melanjutkan problem populis tahun sebelumnya. Mereka berencana, akan menjaga capaian kesehatan Universal Health Coverage (UHC) BPJS, yaitu program yang memastikan masyarakat memiliki akses mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa harus menghadapi kesulitan finansial.

"Capaian UHC kita saat ini sudah di angka 96 persen. Bulan lalu sempat turun. Kita akan pertahankan jangan sampai drop lagi," kata Siska Karina, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, saat ditemui Cirebon Katon di ruangannya.

Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Cirebon, kata Siska, Komisi IV akan fokus dalam mendorong perbaikan

wisata pada Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora). Ia berencana membenahi pariwisata dengan skema yang lebih baik, agar target bupati 5 tahun bisa tercapai.

"Kalau keluar dari RPJMD bupati itu gak bisa. Kita melakukan pengawasan untuk membantu visi bupati. Sekalipun ada perubahan RPJMD bupati, tapi pariwisata tetap masuk poin pertama. Kita juga perlu skema dalam pengelolaan wisata religi yang ada, supaya bisa menambal PAD" ujarnya.

Selain itu, dalam bidang pendidikan juga tak luput dari perhatiannya. Ia bilang, saat rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, terhitung 3400 anak yang buta huruf sejak pandemi.

"Jangan sampai Pandemi Covid 19 ini, menambah jumlah buta huruf. 1-2 bulan anak belajar yang awalnya bisa baca, tapi karena libur panjang, bulan berikutnya malah buta huruf," terangnya.

Politisi Fraksi Golkar itu juga

mengatakan, akan fokus pada pencapaian pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, dengan mengawasi secara ekstra pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).

"Apalagi sekarang banyak NGO, Komnas perempuan dan anak, yang juga konsen menangani itu. Ini menjadi peluang lebih untuk bersama menyelesaikan persoalan perempuan dan anak," katanya.

Terakhir, target pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, dalam penanganan bangunan yang rusak akibat bencana. Saat Komisi IV berkunjung tahun lalu, BPBD mengatakan belum menganggarkan dan justru terjadi saling lempar.

"Ketika kita tanya bagaimana anggaran untuk bencana? BPBD bilang, itu ranahnya Dinsos. Padahal kalau ingat sambutan bupati penutupan akhir tahun lalu, harus ada koordinasi antar SKPD. Masa ngandalin Baznas terus-menerus," paparnya.

Pada, BPBD berkewajiban untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak akibat bencana. Terlebih, Kabupaten Cirebon masih rawan bencana tiap tahunnya.

"Jadi hanya sebatas alat teknis saja, seperti terpal, perahu. Untuk infrastruktur perbaikan rumah belum ada. Tahun ini kita akan tanya lagi," jelas Siska.

Dalam merencanakan program tahun 2021. Sejauh ini, kata Siska, setiap dinas memiliki beberapa program yang telah dikerucutkan satu fokus. "Dinkes fokus UHC, Disdik fokus Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini IPM kita masih di angka 6,6 persen, semoga tahun ini bisa naik," katanya.

Evaluasi Kinerja Satpol PP

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon tahun 2020 dan kinerja 2021.



foto: foto: Quoy/da

Rencana Penggabungan SKPD

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Kelautan mengenai kesiapan penggabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



foto: foto: Quoy/da

Evaluasi Lelang Pembangunan

Bersama Sekretaris Daerah Bagian Pembangunan Kabupaten Cirebon, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengevaluasi pelaksanaan lelang dan pembangunan pada tahun 2020.



Foto-foto : dok sethwan

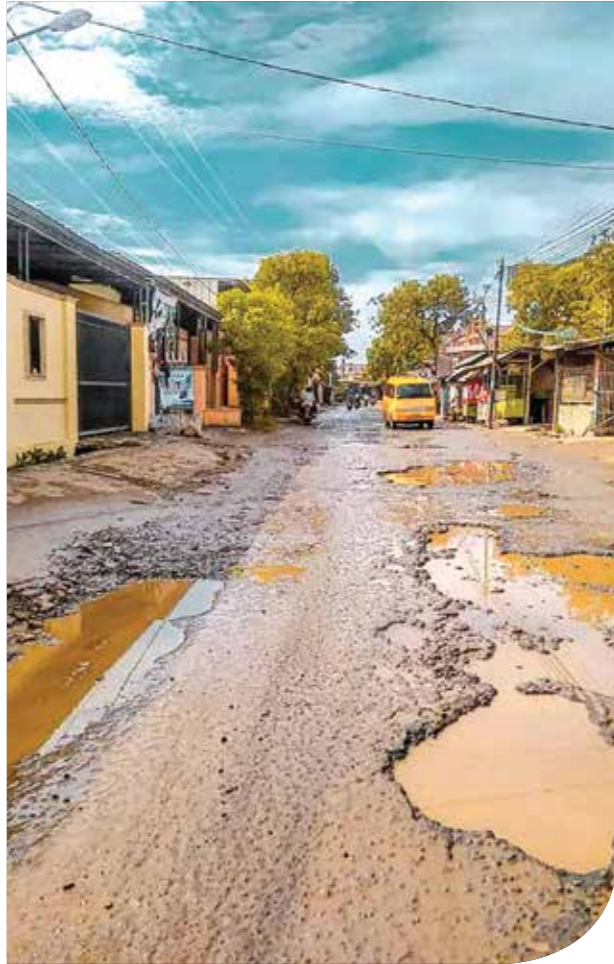
Monitoring Ketenagakerjaan

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi PT Kreasi Garmen Ciledug mengenai jumlah tenaga kerja yang bekerja maupun di PHK akibat pandemi Covid 19.



Foto-foto : dok sethwan

Perlu Perbaiki Jalan Suropati



Saya Assegaf, warga Desa Tegalgubug. Saya mengeluhkan keadaan Jalan Suropati di Desa Tegalgubug Lor tepatnya Blok Al Barokah. Dimana sudah kurang lebih 2 tahun jalan ini rusak parah. Ketika musim banjir air pun menggenangi lubang. Saya sudah meminta perbaikan kepada pemerintah desa maupun kabupaten. Namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Sejauh ini perbaikan baru melalui swadaya masyarakat.

Padahal jalan ini merupakan penghubung 2 kecamatan. Kaliwedi dan Susukan. Sekaligus penghubung 7 desa. Saya berharap di tahun ini jalan ini bisa diperbaiki oleh pemerintah. Terimakasih Bapak Ibu DPRD Kabupaten Cirebon yang berkenan mendengarkan aspirasi kami.
(Assegaf/mahasiswa)

Mengeluh Pelayanan RSUD Waled

Assalamu'alaikum wr wb.

Bapak/Ibu dewan yang terhormat, saya Alif, warga Babakan. Saya ingin mengeluhkan pelayanan RSUD Waled yang kurang tanggap, ketika ada pasien baru.

Selain itu, fasilitasnya juga kurang lengkap, sehingga banyak masyarakat yang dilarikan ke RS lain padahal RSUD Waled itu dekat.

Saya berharap pemerintah bisa ikut mengevaluasi, agar pelayanannya bisa lebih optimal dengan menyampaikan kepada dinas terkait. Mohon maaf sebelumnya, saya ucapkan terimakasih.

(Alif/Karyawan/Babakan)



Butuh Jalur Penyeberangan

Assalamu'alaikum Bapak/Ibu Dewan yang terhormat.

Perkenalkan saya Ningsih, sebenarnya ingin menagih janji pemerintah. Dua tahun lalu pemerintah sempat berencana membuat jalur penyeberangan atau zebra cross di sekitar pasar Mundu, tetapi sampai sekarang masih belum direalisasikan. Saat ini jalan di depan pasar Mundu semakin macet, apalagi jika waktu pagi dan sore hari. Bagi saya seorang ibu rumah tangga, ketika pagi selesai belanja untuk menyeberang saja sangat susah karena banyak kendaraan yang tidak sabar. Mungkin baiknya juga diberi lampu lalu lintas juga.

Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu dewan segan menyampaikan aspirasi saya ke pemerintah atau dinas terkait, agar ditindak lanjut. Terima kasih.

(Ningsih (36) /Ibu Rumah Tangga/Mundu)



Bukit Ajimut Terbengkalai

Assalamu'alaikum wr wb

Terimakasih kepada Cirebon Katon berkenan menerbitkan.

Yang terhormat Bapak Ibu DPRD Kabupaten Cirebon. Bukit Ajimut merupakan potensi wisata yang terletak di Kecamatan Waled. Berada di perbatasan timur selatan, antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Namun, keberadaan Bukit Ajimut belum diperhatikan serius oleh pemerintah daerah, untuk menjadi tempat wisata lokal. Sehingga seringkali justru disalahgunakan menjadi tempat mesum maupun hal buruk lainnya oleh para pemuda-pemudi. Hal ini menurut saya kurang baik kalau dibiarkan saja oleh pemerintah. Saya berharap pemerintah kabupaten bisa mendorong pemerintah desa untuk mulai memperhatikan dan mengurusnya.

(Anto (27)/karyawan/ Cigobang).



Tekad Keras Kuli Panggul

Sebelum wabah covid-19 dalam sehari pendapatan mereka bisa sampai ratusan ribu.

“Biasanya sekali angkut Rp 35 hingga 100 ribu, tergantung jarak dan barang yang dibawa” ujar Abdul, salah satu kuli panggul di Pasar Tegalbugug.

Namun sekarang ini, pendapatan ia mulai berkurang. Abdul hanya mampu mengantongi setengahnya saja.

Tetapi, itu bukan alasan untuk ia berhenti bekerja. Jiwanya tetap melawan angin, karena ada anangan keluarga di pundaknya. •soy



Komisi I Ingin e-KTP 3 Hari Jadi

Enam bulan bukanlah waktu yang singkat dalam pembuatan KTP. Komisi I inginkan ada terobosan. Idealnya tiga hari jadi. Mampukah?



foto: foto: muz/ck

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon banjir aduan. Mereka mengeluhkan lamanya pembuatan e-KTP. Pasalnya 2 sampai 6 bulan baru jadi. Selain itu juga soal ketidaksinkronan data penduduk.

Tentu, masalah tersebut membuat banyak aktivitas masyarakat terlewatkan. "Ada warga yang sampai tidak bisa membuat BPJS karena nomer NIK-nya tidak terdaftar," kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori saat rapat dengan Disdukcapil.

Karena itu, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon bergegas

menindaklanjuti. Langkah konkretnya adalah mengunjungi Muspika Kecamatan Gempol. Kunjungan dalam rangka ingin mengetahui pelayanan administrasi masyarakat.

"Mari kita *sharing* kinerja soal kinerja melayani masyarakat. Sampaikan kendala yang dihadapi selama pembuatan e-KTP," ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Abdul Rahman.

Camat Gempol Imam Supriyadi mengatakan, terdapat dua keluhan masyarakat dalam pembuatan e-KTP. Pertama, dalam sehari Kecamatan Gempol hanya mendapatkan 10 kuota pendaf-

tar. Kedua, dalam mendaftar online koneksi masih lemot.

Sementara untuk perekaman, baru dua hari ini Muspika Kecamatan Gempol bisa melayani perekaman e-KTP. Sebelumnya, pelayanan e-KTP terhambat selama 2 tahun, dikarenakan alat perekam sidik jari rusak.

Adapun dalam meminimalisasi numpuknya pengiriman e-KTP, Imam mengaku, Kecamatan Gempol telah bekerja sama dengan desa. "Tinggal bagaimana pengiriman dari dinas," ungkapnya.

Menanggapi persoalan itu, Hasan Basori mengatakan, telah

berkoordinasi dengan Disdukcapil. Dia meminta agar pembuatan e-KTP bisa diselesaikan dalam jangka 3 hari.

Namun kata Hasan, Disdukcapil bilang sebenarnya rata-rata pembuatan e-KTP seminggu sudah jadi. Masalahnya si pengaju tidak tahu kalau NIK-nya sudah dicetak. Sehingga masyarakat lebih lama menerimanya.

Makanya Hasan meminta agar Disdukcapil segera membuat inovasi. Sehingga si pengaju bisa tahu kalau NIK-nya sudah dicetak. "Apakah berbasis *tracking* atukah informasi. Persoalan ini harus segera dibenahi," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Hj Diah Irwany Indriyati mengungkapkan, ada tiga desa di Kecamatan Gempol yang mendapatkan program Desa Digital dari pemerintah daerah. Ketiga desa tersebut adalah Desa Kempek, Desa Kedung Bunder dan Desa Cikeusal.

Menurutnya, program tersebut untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di era modern. Karena itu Diah berharap, program tersebut bisa dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran.

Menanggapi Diah, Imam mengaku, Kecamatan Gempol telah bersiap menuju Desa Digital. Untuk mewujudkannya, Kecamatan Gempol kini telah memiliki Media Center.

"Alhamdulillah, 2020 kemarin inginnya kita sudah *launching* Media Center. Kita dapat mealaksanakan agenda rapat dengan desa cukup dengan virtual. Sehingga dari kantor kita mengetahui perkembangan desa," pungkasnya.

Dalam pemilihan kuwu serentak mendatang pun, lanjut



Imam, dua Desa di Kecamatan Gempol bersiap melaksanakannya secara digital *e-Pilwu*. Teknisnya dengan menggunakan *e-Voting*. Kedua desa tersebut adalah Desa Walahar dan Desa Gempol.

Adapun dalam persiapan *e-Voting*, Imam mengaku masih ada kendala yang dihadapi Desa Walahar dan Desa Gempol. Terutama soal masih kurangnya

Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu ia berharap, pemerintah daerah bisa memfasilitasinya dengan mengadakan pelatihan *e-Voting*

"Dengan berjalannya program desa digital ini, semoga pelayanan e-KTP dan pelayanan administrasi masyarakat lainnya bisa lebih efisien," tandasnya. •dul

Komisi II : Perlu Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Lebah Madu

UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan telah mengembangkan lebah madu sejak tahun lalu. Namun sampai saat ini belum ada rencana tindak lanjut pasca pelatihan.



foto: foto/ana-d

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, mengunjungi UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan (UPTD PPHH) Provinsi Jawa Barat di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura. Agenda ini mempresentasikan hasil pengolahan lebah madu yang sedang digarap oleh UPTD PPHH.

Pengolahan ini terbilang cukup lama, karena sudah dilaku-

kan sejak tahun lalu. Dan untuk sekarang, UPTD PPHH berharap hasil program ini menjadi gebrakan besar, terutama di Kabupaten Cirebon sendiri.

“Tahun ini kita akan membangun pusat pelebaran di Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Ciamis,” ujar Endik, Kepala UPTD PPHH.

Mendengar itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Hanafi, merespon baik dengan adanya wacana ini. Menurutnya, hasil dari pada lebah itu sangat bermanfaat bagi kesehatan,” katanya.

Namun, menurut Hanafi sendiri, ada beberapa catatan yang harus menjadi pokok utama dalam mengembangkan hasil lebah ini. Agar kejadian yang

sudah-sudah tidak terulang. Ia pun menanyakan syarat untuk mengikuti pelatihan.

“Apa harus dibikin kelompok atau bagaimana? Jangan sampai setelah mengadakan pelatihan tidak ada rencana tindak lanjutnya,” tanyanya.

Menanggapi hal itu, Endik akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong pengembangan lebah ini. Agar bisa diakses oleh masyarakat dengan begitu mudah tanpa mengeluarkan modal. Tentunya, kata Endik, dengan mengaca pelatihan tahun lalu.

“Dari segi pelatihan, syarat untuk mengikutinya tidak sulit. Tahun lalu satu angkatan ada 25 orang, yang penting mereka WNI dan punya KTP. Ini kenapa kita mengambil pelatihan lebah, karena lebah bisa diambil secara alami. Jadi pada saat pelatihan, narasumber memberikan teknik berburu. Jadi mereka tanpa mengeluarkan uang, cuma modal keringat saja,” jelasnya.

Selain itu, Dinas Pertanian memberikan tanggapan dan masukan mengenai program pelatihan pengembangan lebah tahun lalu. Ia mengungkapkan, bahwa sudah ada beberapa titik di daerah Kabupaten Cirebon yang berjalan lancar. Menurutnya, pelatihan dan bantuan sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Kita bisa mengembangkan lebah madu melalui Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon, karena masuknya ke bidang itu. Ada juga beberapa titik yang sampai sekarang masih ada. Bahkan, ada yang sudah panen di daerah Cupang, Waled dan Winduhaji. Kemudian di Gunung Jati juga masih ada untuk lebahnya sendiri. Itu bantuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Cirebon untuk petani lebah,” katanya.



Ia juga menyampaikan beberapa keresahan, terutama mengenai kurangnya pengelolaan hutan di Kabupaten Cirebon dan alasan diadakannya pelatihan.

“Di Sumber, kita punya hutan kota fungsi lindung seluas 10,5 hektar. Tapi pengelolaan untuk kabupaten sendiri tidak ada, jadi lepas begitu saja. Makanya, kenapa kita selama ini mengadakan pelatihan-pelatihan. Dari dulu sebenarnya kita ingin ada bantuan, paling tidak biar sedikit kelihatan. Tapi selama ini dari anggaran Bapelitbangda dicoret,” tegasnya.

Menyoroti hal ini, Hanafi sangat mengapresiasi pengem-

bangkan lebah yang masih ada. Ia mencatat beberapa hal penting yang harus menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pertanian maupun Dinas Kehutanan. Juga, memberikan alasan utama mengapa beberapa program tidak disetujui oleh Bapelitbangda.

“Ini sebagai bahan referensi kami saat ada kunjungan dalam daerah. Kita ingin mengetahui titik mana saja yang sudah berkembang atau tidak. Dan yang perlu kami sampaikan, dari beberapa anggaran yang dicoret oleh Bapelitbangda. Karena belum ada rencana tindak lanjut (RTL) pasca pelatihan,” tandas Hanafi.

Komisi III Minta Perusahaan Bertanggung Jawab

11 perusahaan ditengarai rusaknya jalan Desa Suci. Komisi III minta CSR perusahaan untuk bertanggung jawab.



pp/csnb:00f-00f

Dalam menangani kerusakan infrastruktur pasca banjir, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Desa Suci Kecamatan Mundu. Dalam kunjungan itu, ada hal yang menjadi perhatian utama. Yaitu, persoalan kerusakan jalan akibat kendaraan besar yang melintas.

Seperti diketahui, selain banjir, Desa Suci mengalami kerusakan jalan akibat kendaraan pengangkut muatan milik perusahaan. "Apalagi di musim hujan, ada lubang sedikit jadi melebar karena dilalui kendaraan besar," ungkap Sekretaris Desa Suci.

Menurutnya, hampir setiap hari kendaraan semacam truk tronton melintasi akses vital Desa Suci dengan tonase berlebih, sekitar 7 hingga 8 ton. Belum lagi, berat truknya sendiri bisa mencapai 4 ton. "Kalau seperti itu kami mohon tidak hanya ditambal aspal, tetapi harus merambat beton," tandasnya.

Kabid Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Tomy Hendrawan, mengatakan, jalur yang seringkali dilalui kendaraan besar itu memang tidak cocok dengan kelasnya. Jalan penghubung antar desa itu merupakan jalan tipe

tiga, yang hanya bisa dilintasi kendaraan dengan berat maksimal 8 ton. Sementara kendaraan yang melintas bebannya melebihi kapasitas tersebut.

Menurut pantauannya, sepanjang jalan penghubung antara Desa Mundu, Suci, Banjarwangunan dan Pamengkang, tingkat kerusakan yang terjadi cukup banyak.

"Dari 5,5 kilometer jalan akses warga, 2,2 kilometer dalam keadaan rusak ringan. 1 kilometer rusak sedang, dan 1,3 kilometer rusak parah," papar Tomy.

Selain itu, Tomy juga menyampaikan, tahun 2020 lalu

terdapat dua agenda yang belum terealisasi. Salah satunya perbaikan jalan. Hal itu tidak lain karena sebagian besar anggarannya dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19.

"Sebanyak 86 persen dana perbaikan terefocus, sisanya sebesar 14 persen untuk perbaikan," katanya.

Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto, telah menerima laporan sebanyak 11 perusahaan, yang berdiri di wilayah desa sebagaimana disebutkan. Dengan kendaraan besar yang melintasi jalan tersebut, ia mengimbau agar kedua pihak saling berusaha memecahkan masalah yang ada.

"Keselamatan dan kenyamanan warga tidak boleh diabaikan. Adapun berat beban kendaraan agar disesuaikan karena kontur jalan tidak sanggup menerima beban besar," jelasnya.

Hermanto juga menekan, agar persoalan infrastruktur jalan tidak hanya dilimpahkan semua kepada Dinas Perumahan dan Peta Ruang (DPUPR). Namun, perusahaan-perusahaan juga harus menyesuaikan muatan kendaraannya, sesuai tipe jalan yang dilalui. Bukan sebaliknya, jalan yang menyesuaikan kendaraan.

Menurutnya, kenyamanan jalan menjadi lebih penting. Untuk itu ia berharap, ada kekompakan dari berbagai pihak dalam memperbaiki kerusakan jalan.

"Mari kita saling menjaga kenyamanan," harapnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton menambahkan, persoalan kerusakan jalan harus dilakukan pengkajian ulang. Untuk itu ia berharap agar ada musyawarah



internal dari warga setempat dengan perusahaan-perusahaan yang ada, dalam menyelesaikan problematika itu.

Anton menyarankan, harus ada pemanfaatan dari anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Anton menilai, perusahaan wajib memberikan program CSR untuk kenyamanan bersama. Program tersebut bisa berupa bantuan beton.

Namun ia menyampaikan, harus ada solusi yang berimbang dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Selain kerusakan jalan, Hermanto juga menyinggung perihal perizinan perusahaan. Ia meminta pemerintah setempat, agar melaporkan, jika ada perusahaan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk ditindaklanjuti. •sar

Komisi IV : Perlu Gebrakan Besar Selesaikan Problem Sosial

Dinsos mengaku kekurangan SDM untuk tuntaskan permasalahan sosial. Komisi IV pun meminta, Dinsos melakukan gebrakan besar tahun ini. Bisakah?



pp/losnb:000f-000f

Pagi itu ruangan Komisi IV dipenuhi jajaran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Mereka menggelar rapat bersama untuk mengevaluasi kinerja Dinsos tahun lalu, sekaligus membahas program kerja Dinsos untuk tahun 2021.

“Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat, bahkan tak sedikit yang langsung datang ke kantor kami. Kita harap Dinsos bisa secepatnya selesaikan permasalahan sosial ini,” kata Mahmudi, Anggota Komisi IV

DPRD Kabupaten Cirebon.

Ia mengaku, banyak menerima keluhan berkaitan kesehatan. Bahkan, kata Mahmudi, ada warga yang berkunjung langsung ke Dinsos, untuk meminta bantuan. Namun hingga sekarang belum direspon.

“Keluhan yang masuk ke saya berasal dari 6 kecamatan. Salah satunya ada warga penyintas stroke selama 10 tahun, ketika mengajukan ke dinas, tidak difasilitasi. Padahal kan ada bantuan untuk pengembangan

ekonomi yang anggarannya setengah milyar lebih,” katanya.

Menanggapi Mahmudi, Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon Dadang Suhendra menyampaikan, ada 3 kendala selama menjalankan program. Pertama, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang PNS, terutama dalam bidang informasi dan teknologi (IT). Sehingga Dinsos pun terpaksa mengambil tenaga kerja honorer.

Kedua, terbatasnya anggaran akibat *refocusing* pena-

nganan covid-19. Sehingga ada beberapa program yang tidak terealisasi. Seperti pembangunan gedung serbaguna yang difungsikan untuk pertemuan dan Sitem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

“Kami menganggarkan pembangunan gedung sekitar Rp 400 juta. Tapi, karena hampir Rp 5 milyar anggaran Dinsos direfocusing, program itu tidak berjalan. Padahal, kita berharap bisa secepatnya memiliki gedung,” jelasnya.

Ketiga, bertambahnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti gelandangan dan pengemis (Gepeng). Padahal, Dinsos telah menangani hampir 30 persen atau sekitar 500 PPKS.

“Tapi presentasi tiap tahunnya terus naik. Ini permasalahan sosial yang masih terus Dinsos upayakan agar tahun ini hasilnya lebih baik,” ungkapnya.

Keempat, meningkatnya graduasi mandiri Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 11,3 persen. Padahal target nasional hanya 10 persen.

“Awalnya hanya 9.871 orang, hingga sekarang mencapai 10.120 orang. Dengan anggaran Rp 750 juta, untuk pembinaan, alat peraga pelatihan maupun untuk usaha mandiri. Tahun lalu tidak dilaksanakan karena pandemi covid-19,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Nana Kencanawati menanyakan, program yang akan dilaksanakan selama 2021. Dadang pun menjawab, terdapat 2 program yang akan dilaksanakan.

Menurutnya, Dinsos akan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Tujuannya



agar data masyarakat miskin dan rentan miskin maupun PPKS dapat terealisasi lebih optimal. Dadang mengaku, akan bekerjasama dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dan (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) untuk men-sukseskan program tersebut.

“Kami sedang mencoba untuk memperbaiki SLRT menjadi tempat rujukan seluruh permasalahan sosial, maupun masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, Dinsos Kabupaten Cirebon pun telah merencanakan 4 program yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-038 Tahun 2020 diantaranya: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program

Rehabilitasi Sosial, Program Penangan warga Negara Migran tindak kekerasan, Program Penanganan Bencana Alam.

Nana berharap, program yang akan dilaksanakan 2021 bisa menjadi gebrakan besar bagi Dinsos sendiri. Meski banyak perubahan karena harus menyesuaikan pandemi covid-19. Terutama mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

DPRD Kabupaten Cirebon pun, sebenarnya telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai PPKS Juni lalu. Namun, implementasinya belum terlaksana. Siska Karina, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mengatakan, karena sampai hari ini Perbup sebagai acuan teknisnya belum disahkan. •lan

Fraksi PKB

Peduli Umat Melayani Rakyat

Wakil rakyat perlu banyak tidur. Bukan mata yang terpejam, namun nafsunya yang harus terkendali. Melayani setiap orang tanpa membeda-bedakan, sebab ada janji yang harus ditunaikan. Mampukah Fraksi PKB melakukannya?



akhir sebagai partai nasionalis religius, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki peran strategis dalam mewujudkan integrasi bangsa. Politik Rahmatan Lil 'alamin menjadi semangat yang terus di implementasikan oleh Fraksi PKB (F-PKB) DPRD Kabupaten Cirebon. Merangkul semua kalangan, memikul amanah untuk diperjuangkan.

Memperoleh suara terbanyak pada Pileg 2019 tingkat Kabupaten, PKB menempatkan 10 kader terbaiknya menjadi wakil rakyat. Tersebar dalam berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD), mereka bersinergi secara internal dan eksternal. "Harapan apapun akan terwujud ketika kekompakan tercipta," jelas H. Darusa, Ketua Fraksi PKB.

Tidak ada *euforia* berlebihan bagi F-PKB dalam menyikapi perolehan kursi yang didapat. Sebab kekuatan sesungguhnya bukan sekedar kuantitas, namun kualitas kepedulian kepada umat dan pe-

ayanan terhadap rakyat. Sebagai pemilik mandat, rakyat sangat berharap wakilnya bisa amanat.

Kolaborasi antara rakyat dan wakilnya melahirkan kebaikan. Sejumlah persoalan akan lebih mudah diselesaikan dengan kekompakan. Oleh karena itu, langkah awal F-PKB mengurai masalah di masyarakat dengan mewujudkan integrasi. Seperti masalah sampah, jika hanya hulu yang berjuang sementara hilir abai dipastikan tidak selesai.

Distribusi anggota F-PKB pada setiap AKD menjadi wadah mereka berjuang. Seperti halnya dalam komisi, mereka dituntut agar peka dan sigap pada persoalan. Bermusyawarah untuk melahirkan solusi. Begitu pun pada AKD lain. "Semua anggota dewan F-PKB yang ada di komisi terus bergerak melayani masyarakat sesuai bidangnya," harapnya.

Seperti yang dilakukan oleh anggota F-PKB yang terdapat dalam komisi IV. Keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, ker-

ap kali dibantu hingga tuntas. Masyarakat umumnya datang langsung kerumah anggota dewan atau terkadang keruangan fraksi.

Persoalan kesehatan hanya satu dari sederet masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga optimalisasi peran anggota F-PKB pada setiap komisi terus dilakukan. Hal itu sebagai wujud kepedulian F-PKB terhadap umat dan melayani rakyat.

Upaya merawat kekompakan F-PKB diwujudkan dalam pertemuan rutin. Bukan hanya secara formal, mereka membuat acara bersama keluarga secara bergiliran. Solidaritas dan komunikasi yang dibangun merupakan salah satu strategi mempertahankan kemenangan. "Seminggu sekali sebelum jam kantor, kita upayakan koordinasi internal," terangnya.

Dinamika politik internal disikapi dengan komunikatif. Sementara eksternal mengedepankan politik Rahmatan Lil 'Alamin. F-PKB mengedepankan cara-cara santun dan bersahabat. Sebab perjuangan utama berjuang pada kepentingan rakyat. "Ketika dalam sebuah kendaraan terjadi ban bocor, maka harus bersama di tambal," jelasnya.

'Peduli Umat Melayani Rakyat' bukan sekedar kalimat biasa. Oleh sebab itu harus wujudkan dalam perjuangan nyata. Merelakan seluruh waktu dan tenaga untuk rakyat. "Kita tidak boleh terjun setengah-setengah, harus totalitas. Sebab harus bertanggung jawab. Kalimat itu tidak sembarangan," pungkasnya.

Berikut 10 anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cirebon



Mohamad Luthfi, M. Si.
Cirebon, 19 September 1977



Mad Saleh
Cirebon, 11 Maret 1975



R. Hasan Basori, SE., M. Si.
Cirebon, 09 September 1979



H. Mahmudi, S. Pd. I
Indramayu, 12 Juli 1966



H. Darusa, S.H.
Cirebon, 19 Agustus 1967



Emha Syahrul Alam
Cirebon, 28 Juni 1984



Pandi, SE
Cirebon, 07 Oktober 1966



Hj. Ismiyatul Fatahiyah Yusuf, B. Comm, MPA
Cirebon, 09 Oktober 1986



H. Tanung Hidayat
Cirebon, 14 Maret 1970



DR. Hj. Hanifah, MA.
Cirebon, 25 Desember 1958

H. Darusa

Pantang Membuat Orang Lain Kecewa

Pengalaman menjadi abdi masyarakat tak perlu diragukan. Dua periode menjabat kuwu telah menjadikannya sosok pemimpin yang dekat dan dicintai rakyat. Ialah H. Darusa, pria kelahiran Cirebon, 19 Agustus 1967 tersebut kini kembali berjuang untuk rakyat sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Cirebon.

Sebelum menjadi Kuwu Desa Karang Reja Kecamatan Suranenggala, ia merupakan pedagang beras. Usaha yang juga ditekuni oleh orang tuanya. Ia menjadi kuwu sejak 1999 hingga 2014. "Dua periode saya menjadi kuwu. Padahal, keinginan saya hanya cukup satu periode. Namun dorongan masyarakatlah

yang membuat saya maju dan terpilih kembali," jelas Darusa.

Selesai periode pertama ia diminta untuk melanjutkan mengisi jabatan kuwu sementara hingga 2008. Kepemimpinannya yang tegas dan berani membuat masyarakat semakin yakin dan percaya. "Pernah ada kejadian TKW desa sini pulang dari luar negeri dan diminta uang secara paksa oleh preman desa sebelah," ceritanya.

"Ketika itu Alhamdulillah Allah memberi petunjuk, preman berhasil saya tangkap. Sikap yang saya terapkan dalam memimpin masyarakat bukan dengan kelenyutan, namun semi militer. Saya lakukan tindakan tegas dan cu-

kup keras. Menyesuaikan karakteristik masyarakat," lanjutnya.

Meski cara yang dilakukannya keras, namun justru membuatnya disegani dan dicintai masyarakat. Selama menjadi kuwu, ia berhasil menciptakan masyarakat yang kondusif. "Alhamdulillah selama menjabat sebagai kuwu, masyarakat desa Karangreja tidak pernah terlibat tawuran antar warga atau dengan desa lain," ungkapnya.

Perjalanan sebagai kuwu telah menempatkannya menjadi pengurus kuwu se-Kabupaten Cirebon. Saat itu bernama FKKB (Forum Komunikasi Kuwu Bersatu). Ia ditunjuk sebagai bendahara. Selanjutnya FKKB dirubah



Foto: dokpr/ibadi/darusa

H. Darusa

menjadi FKKC (Forum Komunikasi Kuwu Cirebon) pada tahun 2009 dan ia menjadi penasihat.

Ia bersama forum kuwu turut andil dalam memperjuangkan Undang-Undang Desa. Mereka tergabung dalam parade nusantara. Semangat untuk saling mendukung satu sama berbuah manis. Meskipun 2014 ia bukan lagi sebagai kuwu, namun tetap bersyukur sebab Undang-Undang Desa di sahkan.

Pasca berhenti menjadi kuwu, ia kembali fokus pada usahanya. Menjadi mitra bulog dalam mensuplai kebutuhan beras. Hingga 2019 ia dilamar oleh PKB untuk maju menjadi wakil rakyat melalui Pileg.

“Saya maju dalam Pileg 2019 melalui dapil 4 yang mencakup Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Kedawung, Tengah Tani, dan Talun. Alhamdulillah dengan perolehan 10.886 suara mengantarkan saya menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Cirebon,” jelasnya.

Selain berhasil menjadi anggota legislatif, ia juga dipercaya menjadi ketua Fraksi PKB. Mandat yang diemban melalui proses seleksi. Pengalamannya dalam memimpin pemerintahan desa dan masyarakat pada umumnya tentu menjadi dasar pertimbangan kuat.

Dari era menjabat sebagai kuwu hingga kini menjadi anggota legislatif, prinsip yang ia pegang tak pernah berubah.

Prinsip yang merupakan amanah dari orang tuanya. Ia memegang teguh bahwa pantang dirinya mengecewakan orang lain. Oleh sebab itu, dengan sikap hati-hati berusaha agar tidak ada orang lain yang dibuat kecewa olehnya.

“Pesan orang tua saya begini, Darusa tolong kamu pegang mumpung masih kecil. Jangan ada orang yang kecewa denganmu. Apapun kiranya, upayakan jangan sampai membuat orang kecewa. Kecuali kekecewaannya dibuat oleh orang itu sendiri. Insya Allah kamu akan mulia”. ingatnya.

Selain itu, ia bertekad agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Latarbelakangnya sebagai kuwu, pedagang, dan kini menjadi anggota dewan semata-mata agar bisa memberikan manfaat. Ia tak memiliki ambisi untuk menempati jabatan tertentu. Namun ia selalu siap dengan jabatan apapun yang diamanahkan kepadanya.

“Soal jabata saya serahkan kepada Allah. Meskipun kita berjuang mati-matian, namun jika Allah tidak merestui mau bagaimana. Kita pasrahkan segalanya kepada Allah, karena akan dinilai juga oleh-Nya. Duduk dimanapun juga saya siap, namun tidak berambisi. Saya justru khawatir, jika ambisi saya menggapai jabatan tertentu namun ternyata menurut Allah tidak pantas untuk saya,” terangnya.

Pria 54 tahun ini tergolong

berjiwa muda. Hobi yang ia gemari memacu *adrenaline*, yaitu *off-road*. “Saya pegang forum Feroza komunitas Cirebon sampai ke nasional. Sebelum pandemi, rutin hampir sebulan dua kali main di Muria dan Gunung Kidul Jogja. Dimana ada komunitas yang mengundang komunitas kita pasti berangkat,” terangnya.

Pilihan hobi yang memacu *adrenaline* tersebut dilakukannya semenjak kelas 2 SMA. Bahkan saat itu balapan motor merupakan kegiatan yang tak pernah ditinggalkan. Pernah suatu ketika jempol tangannya pecah akibat dari balapan. Meski begitu, ia tak pernah jera dan terus mengikuti balapan motor.

Meskipun hobinya terbilang liar dan dekat dengan kenakalan remaja. Namun ia tak pernah terlibat dalam kasus negatif “Walaupun dulu anak muda itu disamping hobi fisik, tidak sedikit yang mengarah pada hal negatif seperti narkoba. Tapi Alhamdulillah sedikitpun saya tidak pernah mencicipi,” jelasnya.

Kini, selain offroad ia juga merupakan kicau mania. Jam terbangnya dalam dunia kicau cukup tinggi. Mobilitasnya sudah sampai berbagai daerah. “Kalau sekarang lomba burung itu lain. Dulu, lomba burung itu hanya satu lokasi dan waktu yang sama. Sekarang dihari seminggu banyak tempat yang dilaksanakan. Karena dulu masih teratur dan organisasinya satu yaitu FBI (Forum Burung Indonesia),” terangnya.

Hobi yang ia lakukan tidak membuatnya lupa terhadap tanggung jawab menjadi anggota dewan. “Awalnya saya kaget ketika menduduki jabatan di DPRD. Rasa tanggungjawabnya sangat terasa. Setiap persoalan harus bisa dipecahkan sendiri. Berbeda ketika menjadi kuwu, ketika ada masalah bisa mengumpulkan bawahan dan perangkat desa. Tapi sekarang harus siap dengan kemampuan,” pungkasnya. •Mol

Rumah Baca Asap: Menghidupkan Literasi dan Permainan Tradisional Anak

Menginspirasi. Selain meningkatkan literasi, Rumah Baca Asap mencoba menghidupkan kembali permainan tradisional anak yang kini mulai punah. Untuk menjaga stabilitas komunitas, mereka pun membangun ekonomi kreatif. Bagaimana perjalanannya?



Mengendarai sepeda on-tel, motor hingga mobil *Gowes*, belasan pemuda memasuki gang Dusun Maja 2 Desa Sidamulya, Kecamatan Astanajapura. Kedatangannya sudah ditunggu. Terutama bagi keluarga yang memiliki anak balita. Semua antusias menyambutnya.

Satu persatu buku dikeluarkan dari tongnya. Macamnya banyak, sesuai jenis usianya. Warga yang semula wajahnya layu menjadi tersenyum. Ada harapan agar anaknya mendapat bimbingan belajar lebih. Warga pun mengajak anaknya untuk menuju lokasi lapak baca buku

gratis tersebut.

“Cung mana kah baca-baca buku, mana kah belajar karo kak-kakak”, kata Oni, salah satu penggerak perpustakaan keliling, menyerupai perkataan salah seorang warga terhadap anaknya.

Di depan halaman rumah warga yang disulap jadi pojok literasi, belasan anak duduk berjajar sambil memilih buku-buku kesukaannya. Mereka fokus membaca, didampingi para penggerak perpustakaan keliling. Mereka lantas mengambil krayon kemudian mewarnai. Ada yang menyelesaikan gambar hewan, tumbuhan, hingga alat transportasi.

Usai membaca dan mewarnai, anak-anak tampak ceria menikmati permainan tradisional yang disediakan. Mereka bermain *Engklek*, *Slodoran*, hingga membuat burung origami dari kertas. Shobih Muhammad Fakkar selaku penggagas perpustakaan keliling tersebut mengatakan, anak-anak diperlukan pengetahuan *psikomotorik dan kognitif*.

“Biasanya kami membangun pengetahuan kognitif anak lewat membaca, *Story Telling*, menggambar dan lain sebagainya. Kalau pengetahuan psikomotorik, saya lebih ke permainan tradisional,” ungkapnya.

Perpustakaan keliling itu ber-



nama Rumah Baca Asap (RBA). Komunitas ini berdiri sejak lima tahun yang lalu. Shobih dan kawan-kawan penggerak RBA lainnya melapak buku setiap seminggu sekali. Tepatnya di Jumat sore, selama dua jam.

Selain itu, RBA pun turut memeriahkan dalam banyak peringatan hari besar. "Setiap Hari Kemerdekaan, Tahun Baru Hijriah, Hari Buku Dunia, kami menggelar banyak kegiatan. Mulai dari lomba mewarnai, menggambar kaligrafi, hingga lomba keagamaan lainnya," jelasnya.

Menurut Shobih, banyak tantangan yang dihadapi selama RBA melapak buku. Diantaranya masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca buku. Sebab, masih banyak masyarakat yang menganggap, bahwa usai lulus sekolah anak tidak usah pegang buku, lebih baik terus fokus bekerja mencari uang.

Karena itu, RBA bertekad ingin menanamkan kepada masyarakat, bahwa melihat buku sama halnya melihat *Handpone*. Sebab dia meyakini, bermula dari terbiasa melihat buku, ma-

sarakat menjadi membuka dan membacanya. RBA menargetkan dua tahun mendampingi anak melalui perpustakaan keliling.

Tekad RBA pun tidak main-main. Usai berupaya membangun pengetahuan kognitif dan sikomotrik anak, mereka langsung memantau perkembangan kualitas anak-anak yang didampinginya. Caranya, menayakan kepada orang tua anak, kemudian mendatanya. Setidaknya, kini tekadnya membuahkan hasil.

"Anak-anak yang tadinya cenderung mainan HP, sekarang lebih aktif membaca buku dan menghidupkan permainan tradisional. Selain itu, pemuda Ikatan Remaja Masjid yang sering berkumpul di lapak RBA, kini telah membuat rak buku Masjid. Hampir setiap sore hari mereka mengadakan diskusi," ungkapnya.

Selain itu, tantangan yang tengah dihadapinya yaitu masih minimnya inovasi. Shobih menyadari, RBA membutuhkan banyak informasi dan saran dari banyak pihak. Untuk mensiasatinya, RBA membangun jaringan dengan banyak pihak, untuk sa-

ling berbagi pengetahuan.

"Kami punya cukup banyak partisipan. Salah satunya mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kepustakaan. Saya mendapat banyak ilmu kepustakaan dari dia untuk diterapkan di RBA," ujarnya

Tantangan yang terakhir adalah uang. Sebab, uang komunitas sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas komunitas. Meskipun, tidak setiap program membutuhkan dana, namun kegiatan operasional komunitas akan macet jika ketersediaan dana komunitas terbatas.

Untuk mesiasatinya, RBA tengah membangun kemandirian ekonomi. Mereka memproduksi makanan krupuk berlabel RBA, kemudian didistribusikan ke warung-warung kecil. Setidaknya, usahanya itu membuahkan hasil. "Hasil dari penjualan itu untuk kita adakan kegiatan, beli buku dan alat permainan anak. Sesekali digunakan untuk konsumsi rapat," pungkasnya.

RBA beranggotakan 34. Dari jumlah tersebut 17 anggota terbilang aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara 17 anggota lainnya kurang aktif, karena disibukkan dengan aktifitas perkuliahannya. Shobih dan para penggerak RBA lainnya tidak memperlmasalahkan mereka yang belum aktif. Sebab baginya, hal itu akan menambah pengalaman, yang nantinya bisa diterapkan pada aktivitas RBA.

Sejarah Berdiri

Berawal dari keresahan pribadi Shobih. Seperti umumnya, saat SMA dulu Shobih masih malas membaca buku. Usai lulus SMA, Shobih melanjutkan studi di pondok Pesantren Lirboyo Kediri, salah satu pondok terbesar di Indonesia.



Shobih menilai, pemikiran para santri Lirboyo begitu kritis. Pasalnya literasi di pondok tersebut sangat kental. Dari pagi sampai menjelang pagi aktivitas para santri Lirboyo tidak lepas dari baca buku.

Setelah empat tahun di Pesantren Lirboyo, Shobih melanjutkan studi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. ternyata, aktifitas di lingkungan kampus itu juga tidak lepas dari baca buku. Banyak sekali ruang-ruang literasi baik yang disediakan kampus, organisasi maupun komunitas.

Dari situ Shobih mendapat banyak pelajaran baru, "Ternyata mengandalkan pengalaman di lapangan saja tidak cukup. Tapi juga harus dilandasi teori," katanya. Shobih pun merasa termotivasi untuk bisa beradaptasi. Tentu, Shobih harus mulai terbiasa membeli buku, meminjam dan membacanya. Shobih mengaku seringkali saling tukar buku dan berdiskusi dengan teman-temannya.

Shobih lahir dan tumbuh berkembang di lingkungan pesantren. Dia merupakan cicit

pendiri Pesantren Attarbiyyatul Wathoniyah (PATWA) Mertapada, Alm KH Ahmad Satori. Sejak masih ngampus, Shobih diminta Pengasuh PATWA untuk membimbing para santrinya. Kini Shobih mengajar di MA Agama Islam Mertapada, sebuah lembaga pendidikan formal di bawah naungan PATWA.

Kala itu, Shobih merasa rehas melihat aktifitas para santri PATWA. Pasalnya mereka hanya disibukkan dengan ngobrol perkara biasa. Bahkan, tidak sedikit yang kecanduan bermain *Game*. Shobih pun berusaha merubah kebiasaan tersebut. Berbagai pengalamannya selama di pesantren Lirboyo dan Kampus IAIN Cirebon dia praktikkan di lingkungan PATWA.

"Suatu ketika saya inisiatif ajak mereka untuk berkumpul. Saya keluarkan koleksi buku-buku sambil menyajikan kopi dan rokok. Mereka awalnya kebingungan. Lalu saya ajak mereka untuk membaca, akhirnya mereka mulai mengambil buku dan membacanya," ungkapnya.

Kumpulan yang semula ha-

nya disibukkan dengan membaca berubah menjadi Forum Diskusi Mingguan. Mereka lantas berpikir, bagaimana agar buku-buku yang tersedia bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Akhirnya, dalam forum tersebut disepakatilah mendirikan perpustakaan santri, hingga perpustakaan keliling.

Namun mereka menyadari, ada banyak PR yang harus dilakukan sebelum mendirikan perpustakaan keliling. Salah satunya masih minimnya buku sesuai dengan sasarannya. Sehingga untuk mensiasatinya, mereka membuka donasi buku kepada masyarakat. Mereka memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan mengkampanyekannya dengan *tagline* "Hibah Buku".

Tidak disangka, hasil Hibah Buku yang digerakannya itu melebihi ekspektasi. Pasalnya jumlah buku donasi yang masuk mencapai 4000 buah. Dari jumlah tersebut mereka sortir menjadi 700 buku yang berbeda. Kemudian mereka sortir lagi menjadi sekitar 250 buku anak..

"Ratusan buku-buku untuk anak-anak itu meliputi Ilmu sosial, agama, budaya, kumpulan mata pelajaran, hingga komik," jelasnya.

Selain fasilitas, hal yang menjadi PR bagi mereka adalah menentukan nama komunitasnya. Sehingga dalam satu momen perkumpulan, mereka menyepakatinya dengan nama Rumah Baca Asap (Aspirasi Santri PATWA).

Barulah setelah memiliki fasilitas dan nama komunitas, mereka turun ke warga melapak buku. Lokasi pertama yang menjadi tujuan mereka adalah Desa Kendal. Berjalannya waktu, gerakan mereka meluas ke desa-desa lain wilayah Kecamatan Astanajapura. •Dul

Sinarancang View

Seringkali dilewatkan. Siapa sangka, Desa Sinarancang memiliki keindahan alam yang mampu menarik wisatawan.



foto: foto: qusay/ik

Suguhan apik Danau Setupatok ternyata bisa dinikmati dari sudut yang berbeda. Dari belakang, bukitnya yang menjulang tinggi terlihat lebih mendominasi pandangan. Ia menyatu dengan bentangan rumput hijau, segar memanjakan mata. Keindahan itu bisa langsung didapat wisatawan saat kendaraan mulai melaju dari Desa Sinarancang.

Untuk sampai ke lokasi, waktu yang ditempuh sekitar 20 menit dari pantura. Jalur yang dilalui juga cukup mudah. Dari arah barat Cirebon, ambil kanan saat menemui Masjid Al-Amien Desa Bandengan. Jika dari timur Cirebon, menuju Objek Wisata Danau Setupatok. Di tengah

perjalanan, ambil arah Padepokan Anti Galau saat menemukan pertigaan dengan plang tersebut, selanjutnya akan bertemu pertigaan lagi dan ambil ke arah kanan.

Dari situ keindahan Danau Setupatok dan alamnya sudah bisa dinikmati. Kesan perjalanan pun tak luput dirasakan saat melalui perumahan warga menuju hamparan sawah. Kontur jalan yang turun naik serta berbelok pun menambah romantika perjalanan.

Bentangan alam ini, telah dijadikan sebagai salah satu objek wisata. Terlebih, ketika sampai di area warga Blok Cijalawe terdapat fasilitas spot foto dengan latar belakang bukit Setupatok,

semakin menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang.

"Suasananya sejuk dan enak dipandang," kata Hasan, pengunjung asal Desa Larangan, saat ditanya kesan pertamanya memasuki kawasan ini.

Inisiatif pengelolaan wisata ini, awalnya datang dari pemuda asal Desa Mundu Pesisir, Nuropik. Dengan merogoh kantongnya sendiri sebesar Rp 3 juta rupiah, ia pun mulai membelikan spot foto untuk diletakkan. Usahanya itu alhasil dapat memantik dua spot foto lainnya yang dibuat warga sekitar.

"Pertama kali kesini, karena teman saya ingin jualan. Saya rasa bagus banget nih dijadikan



wisata, awalnya belum ada apa-apa, saya beli spot foto berbentuk *love* untuk menarik pengunjung biar warung teman saya rame. Dan Alhamdulillah bisa bermanfaat, ada spot foto baru juga yang dibuat warung sebelah," katanya.

Selain menghidupkan objek yang mati, ide Nuropik juga membantu memutar roda perekonomian teman dan warung milik warga. Pengunjung berbondong-bondong datang dan jajan di warung yang berjejer sambil menikmati alam.

"Alhamdulillah pendapatannya lumayan, kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi, kalau lagi rame bisa nyampe Rp 500 ribu per hari, kalau sepi Rp 150

ribuan," ungkap Jasini, salah seorang pemilik warung.

Wisata yang dikelola warga setempat ini ada sejak Juni 2020 lalu. Kuwu Desa Sinarancang Munadi menyampaikan, sekitar 300 orang datang untuk berkunjung tiap Sabtu dan Minggu. Menurutnya, Desa Sinarancang memang memiliki bentangan alam yang bisa dieksplorasikan menjadi tempat wisata utama di Kecamatan Mundu.

Pengelolaan wisata desa ini menggunakan lahan milik warga yang kurang produktif. "Tentang lahan sudah kami koordinasikan dan disetujui warga yang bersangkutan, nanti pun akan dikelola bersama-sama warga," kata Munadi.

Hanya saja, meskipun sudah banyak pengunjung dan viral di media sosial, infrastruktur menuju lokasi masih belum terpenuhi. Ditandai dengan kerusakan jalan di beberapa titik, serta akses yang masih menyatu antara jalan warga dan hewan ternak.

Fasilitas lainnya yang belum cukup mendukung yakni, toilet untuk mushola non permanen bergaya pedesaan. Selain itu, belum adanya lahan untuk pengelolaan parkir dengan benar. Sehingga saat ini parkir masih dikelola di lahan warga setempat, dengan biaya parkir seribu atau dua ribu rupiah per kendaraan.

Akibatnya, Pemerintah Desa Sinarancang hingga kini, masih mempertimbangkan tarif bagi para pengunjung. "Karena masih belum bisa memfasilitasi. Kami khawatir mengecewakan wisatawan jika diberi tarif tiket masuk," kata Kuwu Desa Sinarancang Munadi.

Pemdes Sinarancang berencana meningkatkan kapasitas infrastruktur di area Cijalawe, namun mereka mengaku, terbentur oleh anggaran yang masih dialokasikan untuk penanganan wabah covid-19.

"Insya Allah jika 2021 anggaran tidak berbenturan dengan covid-19, akan kita anggarkan untuk perbaikan infrastruktur, listrik maupun pengelolaan lahan parkir serta penambahan spot foto," kata Munadi.

Selain di blok Cijalawe, objek wisata juga akan merambah ke blok sebelumnya, Kabarong. Menggandeng Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pemerintah setempat saat ini sedang dalam proses menggarap Kampung Kabarong yang pembangunannya sudah mencapai 80 persen.

•Sar

Mohamad Luthfi



Kera Juga Bekerja

Pagi ini tanah masih basah. Sepertinya hujan semalam cukup lebat. Udara terasa begitu sejuk. Secangkir kopi hitam sudah setia menunggu di meja serambi belakang. Baru saja saya menyeruputnya perlahan, sebuah pesan masuk ke ponsel.

“Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja.” -- Buya Hamka.

“Salah satu pengkerdilan terkejut dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.” --Buya Hamka.

Ternyata, seorang teman meneruskan pesan (*forward message*) dua kutipan kata mutiara karya Buya Hamka tersebut. Membaca itu, beberapa hal terlintas dalam pikiran. Pertama, tentu saja tentang sosok luar biasa pemilik nama lengkap Prof. Dr. Haji Abdul Malik bin Dr. Syaikh Haji Abdul Karim Amrullah.

Ia seorang sastrawan, aktivis, filsuf, sekaligus ulama. Karya putra kelahiran Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 ini begitu abadi. Petuah-petuahnya tak lekang dimakan zaman. Malah terasa semakin tajam. Bukunya, yang berjudul *Pribadi Hebat*, sangat menginspirasi.

Yang kedua, saya ingat beberapa waktu lalu kala reses kunjungan ke desa. Seekor monyet (kera) sedang bekerja. Ia sedang memerankan Saridin dalam pentas topeng monyet. Cukup menghibur. Meski mungkin ia hanya ‘sekadar bekerja’ --seperti kata Buya Hamka.

Monyet hanya melakukan gerakan sesuai dengan apa yang dilatih sang tuan. Begitu saja terus setiap pentas: mengulangi pekerjaannya. Tak ada yang lain, sekadar bekerja. Mungkin itu yang dimaksud Buya Hamka.

Tentu ini sindiran tajam bagi kita sebagai manusia, yang memiliki rasa, akal, dan budi. Kalau kita bekerja sekadar bekerja, maka kita tak ubahnya seperti kera dalam pentas topeng monyet.

Sebagai anggota DPRD, misalnya, jika berkerja

hanya datang, tanda tangan, duduk, *yes*, dan palu diketuk, bisa jadi kita seperti kera yang diungkapkan Buya Hamka. Pun dengan profesi lain, jika tidak bisa memberikan nilai tambah, maka tak ubahnya seperti robot hidup.

Apalagi, jika bekerja hanya untuk catatan kehadiran (presensi), habis itu menghilang tanpa jejak. Makan gaji buta. Bisa jadi, yang seperti ini, lebih buruk dari cara bekerja kera. Ya, karena kera tak pernah korupsi waktu.

Untuk itu Buya Hamka mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang rajin, tidak malas. Pribadi yang menghasilkan karya adiluhung dari hasil olah pikir. Manusia diberikan pikiran yang cemerlang adalah anugerah tak ternilai. Merupakan “pengkerdilan terkejut, jika pikiran menjadi budak tubuh yang malas.”

Perbudakan seperti itu jelas menurunkan derajat kemanusiaan pelakunya. Kesempurnaan sebagai manusia dikebiri menjadi hanya sebatas derajat kera. Sungguh memprihatinkan.

Bukan hanya itu, bahkan bisa mengenaskan. Jika pikiran yang sudah terlanjur jadi budak kemalasan itu diperintahkan untuk melakukan kecurangan, dan hal-hal yang melanggar hukum. Kemungkinan itu sangat besar terjadi, karena demi menutupi kemalasan biasanya orang cenderung berbuat curang atau melanggar hukum.

Untuk itu, kita harus menjadi pribadi yang rajin, bersemangat, dan selalu mengolah pikiran agar menghasilkan terobosan, inovasi, dan pembaharuan. “Jangan mendahulukan istirahat sebelum lelah,” kata Buya Hamka.

Meski demikian, itu semua adalah pilihan. Silakan Anda tentukan mau bekerja seperti kera, atau menghidupkan pikiran dengan menghasilkan dan mewariskan karya.

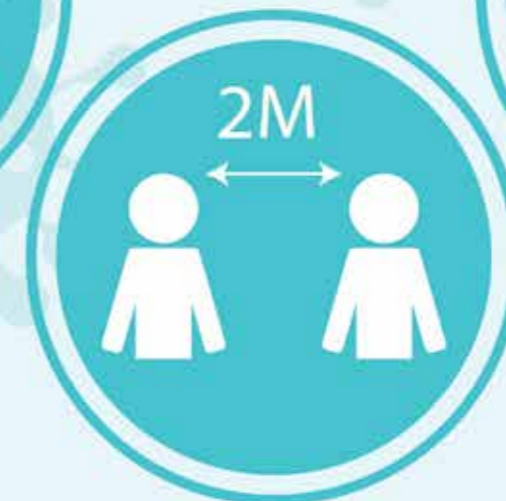
Kalau bagi saya, kita sudah terlanjur hidup sebagai manusia, maka tak ada pilihan lain, selain mengikuti tauladan Buya Hamka: tidak menjadi budak kemalasan.



SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI



MEMAKAI MASKER



MENJAGA JARAK



MENCUCI TANGAN

Selamatkan dirimu dan orang lain!



PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON



1 Memakai Masker

Setiap hari beraktifitas



2 Mencuci Tangan

Gunakan sabun dan air mengalir atau handsanitizer



3 Menjaga Jarak

Hindari kerumunan dan menjaga jarak dengan lainnya minimal 1 meter



Selamatkan dirimu dan orang lain!